BAB III

PENCATATAN PERKAWINAN MENURUT JENDER

A. Pengertian Jender

Salah satu isu dan informasi yang digulirkan oleh globalisasi adalah apa yang dikenal dengan gerakan feminisme atau gerakan jender yang cukup menyentak dan mungkin juga mengganggu nilai-nilai tradisi dan agama yang mapan dan sudah menjadi bagian keyakinan masyarakat, khususnya masyarakat Islam. Tak pelak hal ini memaksa umat Islam untuk memikirkan ulang dan memeriksa kembali teks-teks keagamaan yang menjadi pegangan hidup dalam bertindak, bersikap dan berkarya. Sebab dari teks-teks inilah umat Islam terbiasa mendasarkan segala sesuatunya.¹

Tentu saja seringkali jawaban-jawaban yang dikonstruksi dari *pure text* (teks murni) dengan tanpa menggunakan perangkat keilmuan sosial modern yang berkembang sudah tidak memadai lagi. Di sini dituntut pembacaan kritis dengan pendekatan multi-disipliner. Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana al-Quran memandang problematika jender. Sebab, bila tidak didasarkan pada pengetahuan yang cukup, maka yang akan terjadi adalah kecurigaan dan salah paham yang berakibat pada saling bermusuhan dan mengklaim sebagai yang paling benar.²

¹Waryono Abdul Ghafur, *Tafsir Sosial Mendialogkan Teks Dengan Konteks*, elSAQ Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 102.

²*Ibid*

Jender adalah usaha sebagai perbedaan yang tampak (kelihatan) antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Tetapi oleh beberapa ahli jender keterangan itu mesti ditambah dan disempurnakan. Wilson yang dikutip Yudhie R.Haryono menulis; jender adalah sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan kolektif (masyarakat), yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. Jadi ada aspek fungsi yang membedakan antar keduanya, yaitu antara laki-laki dan perempuan.³

Jender yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.⁴ Pengertian lain menganggap jender adalah suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.⁵

Untuk meluruskan salah paham dalam memperlakukan kaum perempuan yang sering memakai legitimasi teks-teks keagamaan dan menjustifikasi sebagai kodrat, maka yang perlu diberi pengetahuan yang memadai adalah apa yang dimaksud kodrat dan apa bedanya dengan jender. Jender adalah perbedaan sosial antara laki-laki dan perempuan yang dititikberatkan pada perilaku, fungsi dan peranan masing-masing yang ditentukan oleh kebiasaan masyarakat dimana ia berada atau konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya. Pengertian ini memberi petunjuk bahwa hal yang terkait

³Yudhie R.Haryono, *Bahasa Politik Al-Qur'an*, Jakarta: Gugus Press, 2002, hlm. 251.

⁴Mansour Fakih, *Analisis Jender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 8.

⁵Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 4.

dengan jender adalah sebuah konstruksi sosial (*social construction*). Singkat kata, jender adalah interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin. Sedangkan kodrat adalah segala sesuatu yang ada pada laki-laki dan perempuan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan manusia tidak dapat mengubah dan menolaknya.⁶

Dari pengertian itu tampak perbedaan antara keduanya, yakni jender ditentukan oleh masyarakat, berubah dari waktu ke waktu sesuai perkembangan yang mempengaruhi nilai dan norma-norma masyarakat dan memiliki perbedaan-perbedaan bentuk antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Karena itu, kategori jender bisa di pertukarkan satu sama lainnya, antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan kodrat ditetapkan oleh Allah dan bersifat tetap universal (tidak berubah karena waktu dan tempat).

Untuk lebih jelasnya, perhatikan bagan kodrat sebagai berikut:

Manusia Laki-laki	Manusia Perempuan
1. Kuat	1. Lemah lembut
2. Rasional	2. Cantik
3. Jantan	3. Emosional
4. Perkasa	4. Keibuan
5. Ganteng	5. Cerewet
6. Tidak Cengeng	6. Suka Ngrumpi
7. dll	7. dll

Jender juga berbeda dengan seks. Secara umum seks digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi

⁶Waryono Abdul Ghafur, *op.cit.*, hlm. 102.

biologis yang meliputi komposisi kimia dan hormone dalam tubuh, anatmi fisik, reproduksi dan karakteristik biologis lainnya. Dengan singkat seks atau jenis kelamin adalah pensifatan atau pembagian jenis dua kelamin manusia yang di tentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Studi jender lebih menekankan aspek maskulinitas (*rujuliah*) dan feminitas (*nisa'iyah*) seseorang. Sedangkan studi seks lebih menekankan perkembangan aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki (*dzkuriyah*) dan perempuan (*unutsah*).⁷

Untuk lebih jelasnya, perhatikan bagan berikut:

Manusia laki-laki	Manusia Perempuan
1. memiliki penis	1. memiliki rahim
2. mempunyai kala menjing	2. memproduksi telur
3. memproduksi sperma	3. mempunyai alat menyusui

Alat-alat secara biologis melekat pada jenis perempuan dan laki-laki yang tidak bisa dipertukarkan dan sifatnya *permanent*. Hal ini yang lazim disebut dengan kodrat.

B. Kedudukan Kaum Wanita dalam Islam

Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan (oral) kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta, surat sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematian,

⁷*Ibid.*, hlm. 104..

manusia dapat juga mengalami kelupaan dan kesilapan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut dengan akta. Dengan demikian salah satu bentuk pembaruan hukum kekeluargaan Islam adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi. Dikatakan pembaharuan hukum Islam karena masalah tersebut tidak ditemukan di dalam kitab-kitab fikih ataupun fatwa-fatwa ulama.⁸

Dengan demikian, pencatatan perkawinan ini walaupun di dalam UUP hanya diatur oleh satu ayat, namun sebenarnya masalah pencatatan ini sangat dominan. Ini akan tampak dengan jelas menyangkut tata cara perkawinan itu sendiri yang kesemuanya berhubungan dengan pencatatan. Tidaklah berlebihan jika ada sementara pakar hukum yang menempatkannya sebagai syarat administratif yang juga menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan.

KHI memuat masalah pencatatan perkawinan ini pada pasal 5 sebagai berikut.

- (1). Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus di catat.
- (2). Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Selanjutnya pada pasal 6 dijelaskan:

- (1). Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

⁸Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 121-122.

- (2). Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Aturan-aturan di dalam KHI ini sudah melangkah lebih jauh dan tidak hanya bicara masalah administratif. Pertama, di dalam pasal 5 ada klausul yang menyatakan agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Ketertiban di sini menyangkut *ghayat al-tasyri'* (tujuan hukum Islam) yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Kedua, pada pasal 6 ayat 2 ada klausul tidak mempunyai kekuatan hukum. Apa makna tidak mempunyai kekuatan hukum ini? Sayang KHI tidak memiliki penjelasan.

Islam tidak membedakan eksistensi antara laki-laki dan perempuan dalam kapasitasnya sebagai hamba Allah, khalifah, dan perjanjian primordial dengan Allah. Di samping itu, Islam juga tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan kerja dan meraih prestasi yang setinggi-tingginya pada bidang-bidang yang dibenarkan Islam, melainkan semua manusia diberikan kesempatan dan hak yang sama sehingga antara laki-laki dan perempuan berkompetisi secara sehat, tanpa mengabaikan kodrat mereka masing-masing.⁹

Sehubungan dengan itu, di Indonesia misalnya pada dekade terakhir ini terlihat gejala yang menunjukkan adanya "trend kebangunan" kaum wanita yang memanasikan dirinya dalam bentuk penyamaan hak, kewajiban, dan peranan dengan kaum pria dalam berbagai segi kehidupan. Karena itulah munculnya terminologi wanita karier, wanita profesi, wanita pekerja, bahkan

⁹Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi, 2005, hlm.77.

berbagai kajian mengenai jender, sebagai bagian dari fenomena kebangkitan wanita dunia, dan lain sebagainya.¹⁰

Menarik untuk dicatat pernyataan M. Quraish Shihab:

Tentu saja tidak semua bentuk dan ragam pekerjaan yang terdapat pada masa kini telah ada pada masa Nabi Saw. Namun, betapapun, sebagian ulama menyimpulkan bahwa Islam membenarkan kaum wanita aktif dalam berbagai kegiatan, atau bekerja dalam berbagai bidang di dalam maupun di luar rumahnya secara mandiri, bersama orang lain, atau dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, serta mereka dapat memelihara agamanya, dan dapat pula menghindarkan dampak-dampak negatif pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.¹¹

Secara singkat dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan perempuan, yaitu perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama ia membutuhkannya, atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara.

Dalam melaksanakan kehidupan di dunia ini, wanita dan pria saling membutuhkan. Tidak akan sempurna hidup wanita tanpa pria, dan tidak pula akan sempurna hidup pria tanpa wanita. Tidak akan tenang dan bahagia hidup wanita tanpa pria, dan tidak akan tenang dan bahagia hidup pria tanpa wanita, itulah sebabnya ada yang dinamakan pernikahan.¹²

Pokok masalah setelah terjadinya suatu perkawinan adalah hubungan antara suami dengan istri, terutama yang menyangkut soal hak dan kewajiban. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 mengatur hal tersebut

¹⁰Syahrin Harahap, *Islam Dinamis Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran al-Qur'an dalam Kehidupan Modern di Indonesia*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1997, hlm. 143.

¹¹M. Quraish Shihab, *op.cit.*, hlm. 307.

¹²A.Mudjab Mahalli, *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001, hlm. 159.

dengan merumuskan hubungan tersebut dalam pasal 30 sampai dengan Pasal 34.¹³

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepadaNya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang.¹⁴

Agama Islam telah memberikan hak-hak luas yang menjamin martabat kemanusiaan dan melindungi derajat kesopanan bagi wanita itu, tanpa adanya revolusi dan perjuangan emansipasi yang dilancarkan oleh kaum wanita sebagaimana halnya di Barat. Hak-hak wanita dalam ajaran Islam adalah perwujudan dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.¹⁵

Dalam kondisi umat Islam (kaum wanita) seperti digambarkan di atas, kita memasuki dan menghadapi era modernisasi, yaitu era industrialisasi dan globalisasi yang penuh dengan tantangan-tantangan yang besar-besar dan berat-berat. Dalam kaitan itu, dunia wanita Islam dihadapkan kepada beberapa masalah besar dunia modern di mana terkait masalah hak dan kewajibannya.

¹³Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi aksara, 2002, hlm. 88.

¹⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 181

¹⁵*Ibid.*, hlm. 266.

Di antaranya yang terpenting ialah kehidupan rumah tangga dan tugas (kewajiban fungsional) wanita di dalam rumah tangga itu, di samping keharusan keterlibatannya untuk berada di luar rumah dan jauh dari suami dan anak-anaknya dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosial atau ekonomi, bahkan sebagian juga dapat terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik. Dari tantangan tersebut di atas, timbul masalah-masalah baru yang menyangkut hak-hak sipil, hak-hak sosial dan hak-hak politik bagi wanita.

Dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi tantangan-tantangan berat pada masa kini dan yang menjadi lebih berat lagi pada masa mendatang (abad ke-21), maka wanita Islam Indonesia perlu dan harus mampu memilih prioritas dari serentetan kewajiban. Yang jelas adalah bahwa kualitas wanita Islam Indonesia yang rata-rata masih berada di bawah garis standar wawasan keislaman, kondisi intelektual dan kondisi ekonomi sosial, perlu mendapatkan prioritas pertama.¹⁶

Pelaksanaan kewajiban-kewajiban wanita Islam yang mendukung pencapaian kualitas standar akan menjamin bagi wanita itu terpenuhinya hak-haknya (yang diberikan oleh Islam kepadanya) dengan baik. Dengan demikian wanita Islam Indonesia dapat berperan pada masa kini dan masa mendatang dalam peradaban modern untuk ikut mengisi pembangunan nasional di tanah airnya dalam rangka pengabdianya kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 267.

Al-Qur'an merupakan kitab suci pertama yang memberikan martabat kepada perempuan sebagai manusia di saat mereka dilecehkan oleh peradaban besar seperti Byzantium dan Sassanid. Kitab Suci ini memberikan banyak hak kepada perempuan dalam masalah perkawinan, perceraian, kekayaan dan warisan. Masa Nabi SAW merupakan masa yang ideal bagi kehidupan perempuan. Mereka dapat berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan publik tanpa dibedakan dengan kaum laki-laki.¹⁷ Namun menurut Dale F. Eickelman dan James Piscatori bahwa disatu pihak perempuan menjadi demikian sentral bagi imajinasi politik dan moral yang lebih besar, dan esensial bagi penegakan tatanan sipil dan kebajikan, tetapi di lain pihak bersamaan dengan itu masih saja adanya klaim pria bahwa wanita tidak boleh mempunyai hak memilih dan dipilih misalnya dalam keanggotaan di parlemen.¹⁸ Atas dasar itu secara historis menurut Asghar Ali Engineer, perempuan masih juga tetap tersubordinasi (berada di bawah) oleh laki-laki.¹⁹

Pendapat di atas mengisyaratkan masih adanya kaum pria yang belum rela memberi keadilan dan kepemimpinan pada kaum hawa. Padahal keadilan dan kepemimpinan itu sendiri tidak melihat pada segi jenis kelamin apakah pria atau wanita. Keadilan selalu mengacu pada kebenaran yang proporsional. Keadilan tidak melihat pada aspek jender, namun selalu melihat pada aspek persamaan dan sederajat atau kesetaraan. Bersamaan dengan itu setidaknya

¹⁷Agus Nuryanto, *Islam Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Jender*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 61

¹⁸Dale F. Eickelman dan James Piscatori, *Muslim Politics*, Terj. Rofik Suhud, "Ekspresi Politik Muslim", Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1998, hlm. 109

¹⁹Asghar Ali Engineer, *The Qur'an Women and Modern Society*, Terj. Agus Nuryanto, "Pembebasan Perempuan", Yogyakarta: LKiS, 2003, hlm. 1

sampai saat ini, masalah perempuan masih ramai dibicarakan, meskipun jauh sebelumnya telah banyak dibahas hal yang sama, baik dalam seminar, diskusi, *halaqah* maupun dalam kajian buku.

Maraknya pembahasan masalah perempuan yang dahulu terutama dipicu oleh pernyataan-pernyataan elite politik Indonesia yang dengan menggunakan bahasa dan atas nama agama berupaya menjegal lawan politiknya, yang kebetulan lawan politiknya tersebut menjagokan perempuan sebagai pemimpin negeri ini. Walaupun kemudian karena ada kepentingan duniawi lainnya, mereka yang dahulunya ramai-ramai mengumandangkan semboyan tersebut kemudian ramai-ramai pula untuk mengingkarinya. Di samping ada yang masih mempertahankan keyakinan tersebut tetapi kemudian dengan dalil atau alasan darurat, keyakinan yang telah disepakati tersebut dapat ditoleransi dan bahkan dapat dilanggar. Namun pada saat ini pembicaraan masalah perempuan lebih disebabkan oleh maraknya perlakuan yang tidak adil dan tidak semestinya dilakukan terhadap perempuan; mulai dari posisinya dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan sosial, dan lainnya. Meskipun demikian topik yang sampai saat ini masih menarik ialah masalah kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga.²⁰

Dari sini muncullah pro dan kontra mengenai masalah tersebut. Sebagian tokoh dan ulama dengan menafsirkan dalil *naqli* (al-Qur'an dan Hadis) menurut versi mereka, berkesimpulan bahwa perempuan tidak boleh

²⁰Siti Musdah Mulia, *Islam dan Kesetaraan Jender*, Jakarta: Nur Insani, 2007, hlm. 47.

dan tidak sah menjadi pemimpin. Mereka merujuk pada firman Allah SWT. dalam surat al-Nisa ayat 34, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً (النساء: 34)

Artinya: "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka dari itu perempuan yang baik ialah yang patuh, yang menjaga apa yang tidak kelihatan sebagaimana Allah menjaganya. Adapun perempuan yang kamu khawatirkan akan lari, berilah mereka nasehat dan tinggalkanlah mereka sendirian di tempat tidur dan hukumlah mereka. Apabila mereka taat kepadamu, janganlah kamu mencari-cari jalan yang memberatkan mereka. Sesungguhnya Allah itu Maha Luhur dan Maha Agung". (QS. al-Nisa/4: 34).²¹

Selain ayat tersebut mereka juga beralasan dengan hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهْتَمٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجُمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجُمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ (رواه البخارى)²²

²¹Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 123

²²Abu Abdillâh al-Bukhârî, *Sahîh al-Bukharî*, Juz. III, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 89

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Usman bin al-Haisyam dari Auf dari al-Hasan dari Abu Bakrah berkata: sesungguhnya Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan kata-kata yang saya dengar dari Rasulullah SAW pada masa perang Jamal setelah saya hampir menyusul para penunggang onta itu lalu saya berperang bersama mereka. Ia berkata, ketika hal itu sampai kepada Rasulullah SAW bahwa penduduk Parsi telah mengangkat putra Kisra sebagai pemimpin mereka, beliau bersabda: "Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada orang perempuan (dipimpin oleh seorang perempuan) (HR. Bukhari).

Kedua dalil ini, (dan dalil-dalil lainnya) dijadikan argumen yang mengikat bagi mereka bahwa perempuan itu tidak layak dan bahkan tidak sah untuk menjadi pemimpin. Namun untuk akhir-akhir ini yang justru menjadi argumentasi andalan utama adalah hadis, sebab untuk alasan ayat al-Qur'an tersebut memang tampak kelemahannya, dikarenakan ayat tersebut, konteksnya memang hanya berbicara masalah kehidupan suami istri dalam rumah tangga dan sama sekali tidak berbicara mengenai masalah yang berhubungan dengan publik, terutama kepemimpinan perempuan.

Sementara itu tokoh dan ulama lain berpendapat bahwa mengenai kepemimpinan perempuan bahkan dalam level yang paling tinggi pun tidak ada masalah, karena memang untuk hal itu tidak ada larangan, baik dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW ayat yang digunakan sebagai argumentasi pihak pertama memang sangat jelas berbicara masalah keluarga antara suami istri dan tidak berbicara masalah yang lebih luas. Sedangkan mengenai hadis riwayat al-Bukhari tersebut memang berbicara mengenai kepemimpinan perempuan, namun kalau ditilik dari konteks sosio-kultural

melalui *asbab al-wurud*, ternyata tidak dapat dipahami sedemikian dangkal dan harfiah.²³

"Hadis tersebut sesungguhnya hanya merupakan komentar Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu mendengar Putri Kisra diangkat menjadi pemimpin Persi menggantikan ayahnya yang meninggal dunia. Komentar tersebut boleh jadi hanya merupakan do'a Nabi SAW agar negeri Persi yang dipimpin Kisra dan memusuhi Islam serta umat Islam tersebut tidak sukses dan bahkan hancur sebagaimana dahulu Kisra merobek dan menghancurkan surat Nabi SAW dan memang do'a Nabi Muhammad SAW tersebut kemudian dikabulkan oleh Allah SWT, yakni Persi benar-benar hancur pada masa Khalifah 'Umar Bin al-Khaththab RA. Tetapi boleh jadi komentar tersebut hanya merupakan komentar Nabi Muhammad SAW dalam kapasitas beliau sebagai manusia biasa yang pandangannya terbatas pada kenyataan pada saat itu yang memang tidak memungkinkan perempuan dapat memimpin sebuah negara — walaupun Nabi Muhammad SAW tahu bahwa jauh sebelum itu pernah ada perempuan yang sukses memimpin negara, yakni ratu Bilqis pada zaman Nabi Sulaiman AS. Jadi komentar tersebut hanya berupa pernyataan yang ditujukan kepada bangsa lain yang beragama lain pula. Karena itu komentar Nabi sebagaimana tersebut dalam hadis itu tidak merupakan hal yang mengikat kepada umat Islam".²⁴

Sejalan dengan keterangan tersebut, M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul: "*Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah*

²³Muhibbin, *Pandangan Islam Terhadap Perempuan*, Semarang: Rasail, 2007, hlm. 4

²⁴*Ibid.*, hlm. 4.

Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru".

menyatakan:

Harus diakui bahwa memang ulama dan pemikir masa lalu tidak membenarkan perempuan sebagai pemimpin dalam rumah tangga apalagi menduduki jabatan kepala negara, tetapi hal ini lebih disebabkan oleh situasi dan kondisi masa itu, antara lain kondisi perempuan sendiri yang belum siap untuk menduduki jabatan, jangankan kepala negara, menteri, atau kepala daerah pun tidak. Perubahan fatwa dan pandangan pastilah terjadi akibat perubahan kondisi dan situasi, dan karena itu tidak relevan lagi melarang perempuan terlibat dalam politik praktis atau memimpin negara.²⁵

Dalam kaitannya dengan hak-hak perempuan, M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul: "*Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*" menegaskan:

Kita dapat berkesimpulan bahwa, tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai larangan keterlibatan perempuan sebagai pemimpin inklusif dalam berbagai bidang, atau ketentuan agama yang membatasi bidang tersebut hanya untuk kaum lelaki. Di sisi lain, cukup banyak ayat dan hadis yang dapat dijadikan dasar pemahaman untuk menetapkan adanya hak-hak tersebut.²⁶

Pernyataan M. Quraish Shihab tersebut dilatar belakangi oleh adanya pendapat yang menganggap bahwa kepemimpinan hanya untuk kaum lelaki dan perempuan tidak memiliki hak-hak politik. Terhadap pendapat ini Quraish Shihab membuat bantahan sebagaimana telah dijelaskan.

Setelah melihat uraian tentang posisi pria dan wanita dalam suatu perkawinan, maka jelaslah bahwa pencatatan perkawinan sangat penting dalam melindungi kedudukan hukum wanita dan anak-anak. Pencatatan

²⁵M.Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati, 2006, hlm. 350

²⁶M.Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan Khasanah Ilmu-Ilmu Islam, 2002, hlm. 314

perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting terlebih lagi untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Wanita, yang disebut juga perempuan, puteri, istri, ibu, adalah sejenis makhluk dari bangsa manusia yang halus kulitnya, lemah sendi tulangnya dan agak berlainan bentuk serta susunan tubuhnya dengan bentuk dan susunan tubuh laki-laki.²⁷ Masyarakat Yunani yang terkenal dengan pemikiran-pemikiran filsafatnya, tidak banyak membicarakan hak dan kewajiban wanita. Di kalangan elite mereka, wanita-wanita ditempatkan (disekap) dalam istana-istana. Di kalangan bawah, nasib wanita sangat menyedihkan. Mereka diperjualbelikan, sedangkan yang berumah tangga sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suaminya. Mereka tidak memiliki hak-hak sipil, bahkan hak waris pun tidak ada. Pada puncak peradaban Yunani, wanita diberi kebebasan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan dan selera lelaki. Hubungan seksual yang bebas tidak dianggap melanggar kesopanan, tempat-tempat pelacuran menjadi pusat-pusat kegiatan politik dan sastra, seni, patung-patung telanjang yang terlihat di negara-negara Barat adalah bukti atau sisa pandangan itu. Dalam pandangan mereka, dewa-dewa melakukan hubungan gelap dengan rakyat bawahan, dan dari hubungan gelap itu lahirlah "Dewi Cinta" yang terkenal dalam peradaban Yunani.

Dalam peradaban Romawi, wanita sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Setelah kawin, kekuasaan tersebut pindah ke tangan sang suami. Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya,

²⁷Moenawar Chalil, *Nilai Wanita*, Solo: Ramadhani, 1984, hlm. 11.

dan membunuh. Keadaan tersebut berlangsung terus sampai abad ke-6 Masehi. Segala hasil usaha wanita, menjadi hak milik keluarganya yang laki-laki. Pada zaman Kaisar Constantine terjadi sedikit perubahan yaitu dengan diundangkannya hak pemilikan terbatas bagi wanita, dengan catatan bahwa setiap transaksi harus disetujui oleh keluarga (suami atau ayah).²⁸

Fakta sejarah menjelaskan bahwa perempuan adalah kelompok yang sangat diuntungkan oleh kehadiran Muhammad Rasulullah SAW. Nabi mengajarkan keharusan merayakan kelahiran bayi perempuan di tengah tradisi Arab yang memandang aib kelahiran bayi perempuan. Nabi memperkenalkan hak waris bagi perempuan di saat perempuan diperlakukan hanya sebagai obyek atau bagian dari komoditas yang diwariskan. Nabi menetapkan mahar sebagai hak penuh kaum perempuan dalam perkawinan ketika masyarakat memandang mahar itu sebagai hak para wali. Nabi melakukan koreksi total terhadap praktek poligami yang sudah mentradisi dengan mencontohkan perkawinan monogami selama 28 tahun. Bahkan, sebagai ayah, Nabi melarang anak perempuannya Fatimah dipoligami. Nabi memberi kesempatan kepada perempuan menjadi imam shalat dikala masyarakat hanya memposisikan laki-laki sebagai pemuka agama. Nabi mempromosikan posisi ibu yang sangat tinggi, bahkan derajatnya lebih tinggi tiga kali dari ayah di tengah masyarakat yang memandang ibu hanyalah mesin produksi. Nabi

²⁸M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2003, hlm. 296.

menempatkan istri sebagai mitra sejajar suami di saat masyarakat hanya memandangnya sebagai obyek seksual belaka.²⁹

Fakta historis tersebut melukiskan secara terang-benderang bahwa Nabi melakukan perubahan yang sangat radikal dalam kehidupan masyarakat, khususnya kaum perempuan. Dari posisi perempuan sebagai obyek yang dihina dan dilecehkan menjadi subyek yang dihormati dan diindahkan. Nabi memproklamirkan keutuhan kemanusiaan perempuan setara dengan saudara mereka yang laki-laki. Keduanya sama-sama manusia, sama-sama berpotensi menjadi *khalifah fi al-ardh* (pengelola kehidupan di bumi). Tidak ada yang membedakan di antara manusia kecuali prestasi takwanya, dan soal takwa hanya Allah semata yang berhak menilai. Tugas manusia hanyalah berlomba-lomba berbuat baik.³⁰

Islam tidak membedakan eksistensi antara laki-laki dan perempuan dalam kapasitasnya sebagai hamba Allah, khalifah, dan perjanjian primordial dengan Allah. Di samping itu, Islam juga tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan kerja dan meraih prestasi yang setinggi-tingginya pada bidang-bidang yang dibenarkan Islam, melainkan semua manusia diberikan kesempatan dan hak yang sama sehingga antara laki-laki dan perempuan berkompetisi secara sehat, tanpa mengabaikan kodrat mereka masing-masing.³¹

²⁹Siti Musdah Mulia, *Islam dan Kesetaraan Jender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2006, hlm. v.

³⁰*Ibid.*, hlm. v – vi.

³¹Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi, 2005, hlm.77.

Sehubungan dengan itu, di Indonesia misalnya pada dekade terakhir ini terlihat gejala yang menunjukkan adanya "trend kebangunan" kaum wanita yang memanasifasikan dirinya dalam bentuk penyamaan hak, kewajiban, dan peranan dengan kaum pria dalam berbagai segi kehidupan. Karena itulah munculnya terminologi wanita karier, wanita profesi, wanita pekerja, bahkan berbagai kajian mengenai jender, sebagai bagian dari fenomena kebangkitan wanita dunia, dan lain sebagainya.³²

Menarik untuk dicatat pernyataan M. Quraish Shihab:

Tentu saja tidak semua bentuk dan ragam pekerjaan yang terdapat pada masa kini telah ada pada masa Nabi Saw. Namun, betapapun, sebagian ulama menyimpulkan bahwa Islam membenarkan kaum wanita aktif dalam berbagai kegiatan, atau bekerja dalam berbagai bidang di dalam maupun di luar rumahnya secara mandiri, bersama orang lain, atau dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, serta mereka dapat memelihara agamanya, dan dapat pula menghindarkan dampak-dampak negatif pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.³³

Secara singkat dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan perempuan, yaitu perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama ia membutuhkannya, atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa keberadaan perempuan dalam perspektif Islam memiliki kedudukan yang sama dan sederajat. Hal itu lebih tergantung pada amal perbuatannya masing-masing. Pria dan wanita diberikan potensi untuk meraih prestasi, untuk maju dan sekaligus memiliki prospek dalam hidup.

³²Syahrin Harahap, *Islam Dinamis Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran al-Qur'an dalam Kehidupan Modern di Indonesia*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1997, hlm. 143.

³³M. Quraish Shihab, *op.cit.*, hlm. 307.

C. Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Jender

Maraknya pernikahan tidak tercatat telah membangun berbagai opini masyarakat. Para ulama dan pakar hukum menyikapi dan merespon perkawinan tidak tercatat dengan beragam argumentasi sehingga jika ditarik suatu konklusi terdapat perbedaan antara yang pro dan kontra. Pihak yang kontra di antaranya tokoh MMI (Majlis Mujahidin Indonesia) Abu Bakar Ba'asyir menyatakan bahwa tidak ada ketentuan secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun hadis yang mewajibkan nikah harus tercatat. Pernikahan tidak boleh dipersulit, perceraian silahkan dipersulit. Jangan dibalik, perceraian dipermudah, sedangkan perkawinan dipersulit. Jangan mengada-ada yang tidak ada ketentuannya dalam syari'at Islam. Esensi utamanya perkawinann itu adalah tidak keluar dari koridor rukun dan syarat pernikahan. Pencatatan perkawinan tidak masuk dalam kerangka syarat dan rukun pernikahan yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW.

Habib Muhammad Rizieq, dan Habib Idrus Jamalullail sebagai tokoh FPI (Front Pembela Islam) berargumentasi, jika pernikahan tidak tercatat dapat dijerat sanksi hukum, hal itu adalah tidak merefleksikan keadilan hukum. Pernikahan adalah masalah domein privat dan tidak masuk dalam ranah hukum publik. Sanksi terhadap pelaku perkawinan tidak tercatat membuktikan sebuah pemaksaan hukum dan perampasan hak asasi umat Islam. Jika perkawinan harus tercatat maka akan mendorong orang untuk berjinah dan menyuburkan praktek prostitusi.

Adapun pihak yang pro perkawinan harus tercatat, di antaranya, Jaih

Mubarak, guru besar Universitas Sunan Gunung Jati Bandung, menurutnya ditinjau dari esensi atau substansi tujuan pernikahan maka pernikahan itu harus tercatat. Pernikahan tidak tercatat tidak memiliki kekuatan hukum dan menghilangkan hak-hak seorang istri dan anak dari pernikahan itu.³⁴

Karena itu menurut M. Quraish Shihab, salah seorang pakar Tafsir di Indonesia menjelaskan, perkawinan yang tidak tercatat merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan karena dapat menghilangkan hak-hak kaum perempuan.³⁵ Sejalan dengan itu, menurut Dadang Hawari, seorang psikiater, bahwa dalam suatu negara hukum pernikahan apa pun jika tidak tercatat secara resmi, maka harus dinyatakan tidak sah, karena pernikahan yang tidak tercatat lebih banyak membawa madarat daripada manfaatnya.³⁶

M. Sujari Dahlan mencoba mendukung pencatatan perkawinan dengan kemashlahatan sebagai alasannya, serta menggunakan tiga kaidah: pertama, kaidah mashlahat itu sendiri, yaitu perolehan manfaat danantisipasi atau penolakan terhadap kerusakan (*jalb al-manafi' wa daf' al-mafasid*); kedua, kaidah *sadd al-dzari'at* (menghindarkan dan mengantisipasi kesulitan di masa yang akan datang, preventif); dan ketiga, pencatatan perkawinan sebagai salah satu bentuk interaksi antara fikih Islam dengan perkembangan masyarakat sebagai akibat dari perubahan (*taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman wa al-makan*).³⁷

³⁴http://swaramuslim.net/printerfriendly.php?id=2331_0_1_0_C, diakses pada tanggal 23 April 2010

³⁵M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2006, hlm. 216.

³⁶Dadang Hawari, *Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan)*, Jakarta: FKUI, 2006, hlm. 83.

³⁷http://swaramuslim.net/printerfriendly.php?id=2331_0_1_0_C, diakses pada tanggal 23

Sejumlah pakar fikih mempertanyakan mata rantai intelektual mengenai pencatatan perkawinan (nikah, cerai, dan rujuk); sebab salah satu sumber hukum perkawinan adalah kitab-kitab "kuning" yang telah dijadikan pedoman oleh hakim dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama; akan tetapi, dalam kitab-kitab tersebut tidak terdapat pendapat ulama yang menetapkan (menganjurkan) agar perkawinan itu dicatat.

Secara historis, Mesir pada tahun 1931 (jauh sebelum UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk disusun dan diberlakukan), telah membentuk UU Perkawinan. Salah satu ketentuan yang dikandungnya adalah bahwa perkawinan yang diakui adalah perkawinan yang dibuktikan dengan akta perkawinan yang resmi.³⁸ Al-Sayyid Sabiq³⁹ mengutip pasal tersebut sebagai berikut:

"Pengakuan perkawinan atau pernyataan telah kawin tidak dapat diterima (apabila ada bantahan dari salah satu pihak atau pihak ketiga), kecuali apabila dibuktikan dengan akta perkawinan yang resmi.

Dalam konteks Indonesia, kitab *Fiqh al-Sunnah* dipelajari dan dijadikan rujukan utama oleh para mahasiswa dalam mempelajari *fiqh munakahat* dalam lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam. Salah satu buktinya adalah bahwa Agus Salim (alumni Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang lulus pada tahun 1972), telah menerjemahkan buku (dari Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia) yang ditulis oleh gurunya

[April 2010](#)

³⁸http://swaramuslim.net/prINTERfriendly.php?id=2331_0_1_0_C, diakses pada tanggal 23 April 2010

³⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II, Beirut: Dar al-Fikr, 1983, hlm. 60

ketika kuliah. Dalam buku terjemahan tersebut, terdapat informasi mengenai anjuran pencatatan perkawinan yang dikutip dari kitab *Fiqh al-Sunnah* karya al-Sayyid Sabiq.⁴⁰ Dengan demikian, patut diduga bahwa pencatatan perkawinan yang diamanatkan oleh UU Nomor 22 Tahun 1946 dan UU Nomor 1 Tahun 1974, dapat diduga bahwa akar intelektualnya bersumber pada UU Perkawinan Mesir Tahun 1931 dengan salah satu medianya adalah kitab *Fiqh al-Sunnah* karya al-Sayyid Sabiq.

⁴⁰http://swaramuslim.net/printerfriendly.php?id=2331_0_1_0_C, diakses pada tanggal 23 April 2010